

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arsil, Fitra, et.al. 2005. “Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Perlindungan Hak – Hak Konstitusional : Analisis Hilangnya Hak Memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” Penelitian Kerja Sama Antara Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Bakry, Noor Ms. 1987. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar – dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fadjar, A. Mukthie. 2013. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif Presiden, dan Kepala Daerah dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*. Malang: Setara Press.
- H. I., A. Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kusnardi, Mohammad. 1998. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Romadlon, Suryo Gilang. 2016. *Penegak Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Calon Perseorangan Pilkada*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Romli, Lili. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sinamo, Nomensen. 2010. *Perbandingan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Winarno. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

INTERNET

- <http://pilkada.liputan6.com/read/2330817/bawaslu-jateng-temukan-72-ribu-masalah-dpt-pilkada-serentak>, diakses pada 30 Maret 2017.